

**BURUH DAN KEKUASAAN:
DINAMIKA PERKEMBANGAN GERAKAN SERIKAT PEKERJA
DI INDONESIA (MASA KOLONIAL – ORDE LAMA)**

Sazalil Kirom

084284027

email: zelly.cipit@gmail.com

*Jurusan Pendidikan Sejarah FIS
Universitas Negeri Surabaya*

Abstrak

Sejarah gerakan buruh di Indonesia sangat terkait erat dengan gelombang politik kebangsaan dalam perjuangan pembebasan diri dari kungkungan kolonialisme yang terjadi saat itu. Dinamika perkembangan gerakan serikat pekerja di Indonesia pada masa kolonial sampai masa pergerakan sangat dipengaruhi oleh kelas menengah terpelajar yang mulai tumbuh pada saat itu. Kelompok kelas menengah ini terbentuk secara tidak sengaja sebagai akibat dari kebijakan rezim kolonial dalam bidang pengajaran yang memberi ruang bagi priyayi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah Belanda sejak tahun 1864. Kelas menengah tersebut telah membawa ide-ide dan gagasan-gagasan baru baik dalam pola organisasi maupun pola perjuangan. Mereka berperan sebagai pemrakarsa utama dalam mengerahkan dukungan rakyat dan mengorganisir suatu pergerakan politik nasionalis yang menghasilkan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dalam perjalanannya, jika pada masa kolonial gerakan buruh menjadi salah satu kekuatan oposisi yang menentang kekuasaan pemerintahan kolonial, pada masa orde lama gerakan buruh merupakan salah satu kekuatan utama penopang kekuasaan rezim yang berkuasa.

Kata Kunci: kolonialisme, rezim, priyayi, oposisi

Abstract

The history of the labor movement in Indonesia is closely related to the political wave national liberation struggle the confines of colonialism that occurred at that time. The dynamics of the development of the trade union movement in colonial Indonesia until the movement is influenced by the educated middle class began to grow at the time. Middle class was formed by accident as a result of the policy of the colonial regime in the field of teaching which provided space for native aristocracy to get a formal education in Dutch schools since 1864. The middle class has brought new ideas and new ideas both in patterns and pattern organizations struggle. Their role as the primary initiator in mobilizing popular support and organize a nationalist political movement that produces independence for Indonesia. Along the way, if the labor movement in the colonial period to be one of the opposition forces against the colonial government power, in the old order of the labor movement is one of the main forces supporting the regime in power.

Keywords: colonialism, regime gentry, opposition

A. PENDAHULUAN

Timbulnya gerakan buruh di kalangan bangsa Indonesia sebenarnya merupakan suatu letupan reaksi yang muncul akibat terkoyaknya harga diri sebagai suatu bangsa yang merasa terkungkung hidup dalam penjajahan. Pada masa itu serikat buruh tampil sebagai organisasi golongan yang hanya menampung masyarakat keturunan Eropa sebagai anggotanya, sehingga timbul keinginan dari kelompok pribumi untuk membentuk organisasi serupa. Dalam perkembangannya, organisasi yang pada mulanya bertujuan untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan buruh ini, bereinkarnasi menjadi gerakan politik. Tidak mengherankan jika dalam

perjalanannya pasang-surut pergerakan buruh sebagian ditentukan oleh gelombang politik kebangsaan dalam perjuangan pembebasan diri dari kungkungan kolonialisme pemerintahan Hindia Belanda. Penggerak utama dari semua itu adalah golongan kelas menengah atau kaum intelegensi, yang sangat berpengaruh terhadap tumbuh-berkembangnya gerakan serikat pekerja tersebut, terutama pada masa-masa awal pergerakan dan pasca kemerdekaan. Berangkat dari itu semua, tulisan ini hendak mencoba membahas dinamika perkembangan gerakan serikat pekerja di Indonesia pada masa kolonial sampai dengan masa pasca-kemerdekaan (orde lama) dari

teori dan sejarahnya, berikut implikasinya terhadap gerakan politik kebangsaan di Indonesia.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN:

1. Serikat Pekerja dan Kelas Menengah Dalam Perspektif Teoretis dan Historis

Dilihat dari sisi definisi, serikat pekerja (SP) menurut Yunus Shamad adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh pekerja, dari pekerja dan untuk pekerja yang bertujuan untuk melindungi pekerja, memperjuangkan kepentingan pekerja serta merupakan salah satu pihak dalam bekerjasama dengan perusahaan.¹ Sementara yang dimaksud dengan buruh adalah mereka yang berpartisipasi secara langsung ataupun tidak langsung dalam suatu proses produksi. Mereka menghasilkan suatu barang serta memberikan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat. Buruh melakukan semua itu dengan cara menjual jasa tenaganya. Dapat juga dikatakan bahwa yang disebut dengan buruh adalah para pekerja upahan di sektor industri yang terlibat secara massif untuk berbagai macam barang konsumsi dan modal. Oleh karenanya, yang dikerjakan biasanya lebih bersifat kolektif, mereka juga seringkali kurang menghargai dirinya secara individual, melainkan lebih menghargai dirinya secara kolektif, hal ini disebabkan karena adanya sifat ketergantungan dalam proses produksi tersebut. Dalam hubungan ini, kepentingan buruh sebenarnya adalah upah yang adil sehingga memungkinkan mereka baik secara individu maupun kelompok dapat hidup secara layak dan manusiawi.²

Terdapat beberapa teori yang berusaha menjelaskan asal-usul evolusi serikat pekerja. Pandangan historis umumnya beranggapan serikat pekerja timbul karena adanya industrialisasi. Akibat dari perkembangan industrialisasi tersebut mendorong para pekerja ke dalam posisi ketergantungan sehingga penghasilannya, kondisi kerjanya, maupun perlindungannya berada di luar kekuasaan serta kendalinya. Dalam hal ini, untuk mewakili, melindungi, dan memajukan kepentingan-kepentingannya, maka para pekerja membentuk serikat pekerja untuk melakukan perundingan secara kolektif dengan pemberi kerja atau pengusaha.³

SP sendiri pertamakali terbentuk di Inggris dan Amerika Serikat pada akhir abad ke 18. Pada mulanya serikat buruh hanya berupa klub sosial hingga kemudian berkembang dan banyak memberi perhatian pada permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan upah dan persyaratan kerja. Seiring dengan berkembangnya proses industrialisasi dan meluasnya produksi keluar dari pasaran lokal kepada pasaran nasional maka asosiasi tersebut berkembang menjadi "Federasi" secara nasional.⁴

Berbeda dengan gerakan SP di Barat yang disebabkan oleh perkembangan industrialisasi, di Indonesia SP berkembang dari gerakan kelas menengah atau kaum terpelajar. Mereka inilah yang pertamakali mendorong terbentuknya SP, beberapa di antaranya kemudian bereinkarnasi menjadi organisasi-organisasi kebangsaan yang bersifat militan dan radikal dalam melakukan aksi-aksi pergerakannya melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Harry J. Benda menguraikan ada 4 faktor yang menyebabkan radikalisme dikalangan intelegensi Timur yaitu; [1] Munculnya intelektual baru yang telah mempelajari berbagai keterampilan dari peradaban asing secara tidak sengaja masuk sedemikian jauh dalam komunitas mereka, dan dengan perantara mereka, dapat bertahan di dalam suatu lingkungan sosial di mana hidup tidak lagi sesuai dengan tradisi setempat.⁵ [2] Kaum intelektual Timur tersebut biasanya merupakan kelompok sosial yang terpencil di dalam lingkungannya. Hal itu sebagian besar adalah karena, golongan baru itu bukanlah hasil dari pertumbuhan sosial yang organis, melainkan hasil dari pendidikan asing yang secara lunak ditempelkan pada masyarakat pribumi di Timur.⁶ [3] Berkaitan dengan jumlah mereka, serta lapangan kerja yang tersedia.⁷ Di mana pada umumnya lebih kecil dari pada negara-negara Barat yang telah maju industrinya. Yang terakhir [4] sebab ideologis.⁸ Dalam menentang dominasi kelompok *status quo* masyarakat tradisional, yang dianggap bertanggung jawab atas terjadinya keadaan politik dan sosial masyarakat, kebanyakan kaum intelektual baru cenderung untuk menentangnya secara langsung maupun tidak langsung. Baik feodalisme maupun kolonialisme, kekuasaan oleh golongan pribumi maupun oleh orang asing dalam pandangan kaum intelegensia merupakan akibat buruk dari kekuasaan politik, militer dan ekonomi dunia Barat. Karena itu, tidak heran jika ajaran-ajaran sosialis dan Komunis berhasil mendapat lahan yang subur dikalangan intelektual Timur dari pada kaum intelektual Barat.⁹

Golongan tersebut terbentuk secara *accidental* sebagai akibat dari kebijakan rezim kolonial dalam bidang pengajaran yang memberi ruang bagi priyayi pribumi untuk mendapatkan pendidikan formal di sekolah-sekolah Belanda, yang dimulai sejak tahun 1864 di mana orang pribumi diizinkan memasuki sekolah dasar (ELS). Sebagaimana digambarkan oleh Sutherland bahwa:

"...Pada awal abad 19, muncul suatu unsur dalam masyarakat pribumi di kota-kota Hindia Belanda, yaitu lapisan cendekiawan. Walaupun para anggotanya umumnya berasal dari lingkungan priyayi, namun mereka telah keluar dari kerangka pangreh praja dan, sedikit-tidaknya sampai batas tertentu, keluar

¹Yunus Shamad, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Sumberdaya Manusia, 2000, hal. 79

²Ryadi Gunawan, "Di Tengah Deru Himpitan Mesin-Mesin Pabrik", dalam Aris Wibawa (ed.), *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik*, Yogyakarta: LAPERA dan FISIP Univ. Atmajaya Yogya, 1998, hal. 5

³Sentanoe Kertonegoro, *Gerakan Serikat Pekerja*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001, hal. 2

⁴Yunus Shamad, *Op. Cit.*, Hal. 80

⁵Arnold J. Toynbee, *A Study Of History*, New York: Abridgement of Volume I-VI, 1947, hal. 394

⁶Harry J. Benda dalam Sartono Kartodirdjo (ed.), *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981, hal. 156

⁷*Ibid.*, hal. 157

⁸*Ibid.*, hal. 158

⁹*Ibid.*, hal. 159

dari kultur tradisional. Mereka hidup diperbatasan antara masyarakat pribumi dan masyarakat kolonial, bekerja di dalam lembaga-lembaga yang sedang tumbuh dari kalangan kehidupan pribumi kota kelas menengah, sebagai guru-guru atau wartawan-wartawan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Mereka terdiri dari suatu campuran heterogen kaum peranakan Cina dan Arab, priyayi yang telah tercabut dari akarnya, Indo-Eropa, dan santri-santri liberal; yang masing-masing dipersatukan oleh sikap, pengalaman, kekecewaan politik dan, sering kali juga oleh suatu kegairahan bersama akan usaha-usaha ekonomi spekulatif. Orang-orang ini tidak lagi merasa senang menduduki tempat yang mapan dalam struktur masyarakat Hindia Belanda; mereka memperoleh kesempatan mendapatkan pekerjaan-pekerjaan baru, sarana-sarana penunjang baru, gagasan-gagasan baru dan informasi baru”¹⁰

Dalam pengertian politik, kelas menengah sendiri tidak dapat didefinisikan secara tunggal karena kompleks dan luasnya cakupan pembahasan. Richard Robinson mengemukakan, dalam tingkat luas, kelas menengah biasanya diartikan sebagai suatu kelas yang mencakup kelompok-kelompok sosial yang berkembang, yang dianggap berada di antara buruh dan petani, atau “kelas bawah”, di satu pihak, dan “kelas yang berkuasa” apakah itu feodal atau kapitalis, di pihak yang lain. Masyarakat kelas menengah, dalam pandangan ini memiliki pendidikan, keterampilan, relatif kaya, dan memiliki nilai-nilai individualisme, materialisme, sekularisme dan rasionalisme.¹¹

John Kautsky¹² mengidentifikasi bahwa peranan sebagai pemrakarsa utama dalam mengerahkan dukungan rakyat dan mengorganisir suatu pergerakan politik nasionalis banyak dimainkan oleh kaum intelektual yang telah meyerap sejumlah wawasan dan nilai-nilai peradaban Barat melalui pendidikan oleh pemerintah kolonial dan rasa frustrasi karena terbatasnya kesempatan politik maupun kesempatan lainnya di dalam rezim kolonial. Kelas menengah tersebut merasa telah mengisi kekosongan yang ditimbulkan oleh kegagalan pejabat pribumi untuk mewakili rakyat dalam hubungannya dengan penguasa, dalam menyokong rakyat kecil pada masa-masa percobaan dengan menurunnya kesejahteraan rakyat.¹³ Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwa kaum terpelajar sangat besar perannya di masa kolonial, yaitu sebagai pemimpin nasionalis yang mengerahkan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kemerdekaan

dicapai, golongan ini pula yang menjadi elit penguasa atau *establishment* baru.¹⁴

2. Gerakan Serikat Pekerja Pada Masa Kolonial

Gerakan Serikat Pekerja (SP) pertamakali terbentuk di Indonesia pada abad ke 19, diawali dengan lahirnya *Nederland Indische Onderwys Genootschap* (NIOG) atau Serikat Pekerja Guru Hindia Belanda pada tahun 1879 yang dipengaruhi oleh pergerakan sosial demokrat di Belanda. Setelah itu lahir beberapa SP lainnya seperti; *Pos Bond* (serikat pekerja pos) 1905, *Cultuur Bond dan Zuiker Bond* (serikat pekerja perkebunan dan pekerja gula) 1906, serikat pekerja pemerintah 1907, serta *Spoor Bond* (serikat pekerja kereta api) 1913 organisasi ini berkembang menjadi militan, ketika berada di bawah pimpinan Semaun dan Sneevliet. Kedua tokoh itu tercatat sebagai tokoh gerakan radikal di Jawa pada masa selanjutnya, dan sampai tahun 1920-an, nama mereka masih sering terdengar di kalangan pergerakan. Organisasi-organisasi buruh di Indonesia sendiri, pada saat itu terutama berakar pada sektor transportasi dan perkebunan. Mereka memerankan bagian penting dalam serangkaian babak perjuangan kemerdekaan negeri yang penuh kekerasan. Organisasi-organisasi buruh ini mendahului partai-partai politik dan beragama organisasi massa lain.¹⁵

Pada masa itu, para pekerja pribumi di berbagai perusahaan dan kantor swasta serta pemerintah mulai mempunyai gagasan untuk mendirikan SP pribumi sendiri tanpa warga negara asing. Timbulnya gagasan tersebut dipicu oleh perkembangan yang terjadi di sektor jasa dan perdagangan yang mulai tumbuh saat itu, sehingga kemudian mendorong para pekerja pribumi tersebut untuk memperjuangkan hak-hak serta kepentingan-kepentingannya seperti; syarat dan kondisi kerja, kesehatan, keselamatan kerja, upah, jaminan sosial, kesejahteraan, dan lain-lain. Namun demikian, usaha tersebut ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, sebab sejak awal para pekerja selalu dihalangi oleh para majikannya, misalnya dengan cara memperpanjang jam kerja serta mengabaikan hak-hak para pekerja sehingga membuat kesempatan mereka untuk berserikat menjadi sulit. Karena itu, hubungan kerja antara majikan-pekerja pada masa kolonial ini berjalan konfrontatif, di mana majikan menolak untuk melakukan perundingan kolektif.¹⁶

Lahirnya Boedi Oetomo (BO) pada tanggal 20 Mei 1908, dapat dianggap sebagai awal dimulainya gerakan nasionalis di Indonesia. BO merupakan organisasi pertama di Indonesia yang disusun dengan bentuk modern,¹⁷ mereka bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan, didirikan oleh para mahasiswa sekolah kedokteran STOVIA. Organisasi ini bersifat sangat priyayi dan menarik anggota-anggotanya dari kalangan kelas atas dan kelas menengah Jawa. Landasan berpijak

¹⁰ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983, hal. 114

¹¹ Richard Robinson dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996, hal. 140

¹² J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, 2003, hal. 23

¹³ *Ibid.*, hal. 115

¹⁴ Sartono Kartodirdjo(ed.), *Op. Cit.*, hal. 11

¹⁵ Vedi R. Hadiz, “Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara”, *Jurnal SEDANE Vol.3 No.2*, 2005.

¹⁶ Sentanoe Kertonegoro, *Op. Cit.*, hal. 9

¹⁷ Yaitu dengan pengurus tetap, anggota, tujuan, rancangan pekerjaan dsb, didasarkan atas anggaran dasar dan rumah tangga yang telah ditetapkan.

mereka adalah bersikap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial, di samping program beasiswa dan pendidikan priyayi.¹⁸ Pada akhir tahun 1911, H. Samanhudi mendirikan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian berubah nama menjadi Serikat Islam (SI) dengan tujuan memajukan perdagangan dan perekonomian pribumi. Tidak seperti BO yang berorientasi priyayi, gerakan SI mencari pengikut di kalangan rakyat jelata (penduduk desa, pedagang kecil, guru-guru Islam dan nelayan), mereka tidak membatasi kegiatannya hanya pada kelompok-kelompok pimpinan. Apresiasi yang besar dari masyarakat saat itu, telah membuat gentar pemerintah kolonial dan menganggapnya sebagai gangguan atau lebih tepatnya ancaman. Di kota-kota kecil priyayi-priyayi baru dengan status menengah ini memiliki wibawa cukup besar sehingga mudah dalam mendapatkan informasi, yang memungkinkan mereka berperan sebagai alternatif terbatas bagi pejabat-pejabat pemerintah. Sementara pada tingkat lebih tinggi kaum terpelajar kota yang lebih radikal secara terus terang menolak kekuasaan moral, sosial dan politik pemerintahan kolonial.¹⁹

Lahirnya kedua gerakan kebangsaan tersebut berpengaruh besar terhadap tumbuh-berkembangnya gerakan SP. Karena mulai saat itu lahir SP-SP baru seperti: Perkumpulan Bumiputera Pabean (PBPP) 1911, Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputera (PPPB) 1914, Serikat Pekerja Perusahaan Partikelir (SPPP) 1915, *Opium Regie Bond* (ORB) 1916, SP Pabrik Gula 1917, dan lain-lain. Masa itu juga diwarnai oleh bersatunya pegawai pemerintah dengan pegawai partikelir dan golongan pekerja Eropa dengan pekerja pribumi. Cikal bakal organisasi buruh sendiri lahir dalam kongres Nasional IV Serikat Islam (SI) di Surabaya pada 1912 setelah masuknya tokoh-tokoh berhaluan kiri dalam tubuh SI seperti Alimin, Semaoen dan Soerjopranoto. Dari kongres itu lahir sebuah federasi buruh bernama PPKB (Persatuan Pergerakan Kaum Buruh) pada tahun 1919. Dalam program umumnya, PPKB menetapkan negara sebagai pelaksana perintah rakyat dan berfungsi untuk mempersatukan kaum buruh untuk mengubah nasibnya.

Berkecamuknya Perang Dunia I yang juga menyeret negara induk Belanda ke medan perang membuat perekonomian Hindia Belanda, negeri jajahannya, terkena imbas malaise atau kelesuan ekonomi melanda tahun 1921. Inflasi menanjak tajam, sementara upah buruh-buruh tidak ikut naik, atau bahkan turun, rasionalisasi perusahaan terjadi di mana-mana. Maka mulailah Semaoen mengorganisasikan buruh-buruh SI Semarang untuk mogok. Keberhasilan buruh perabotan mogok diikuti oleh buruh pencetakan, buruh pembuat mesin jahit Singer, buruh bengkel mobil dan buruh transportasi kapal uap dan perahu. Jakarta, Bandung, Surabaya dan kota-kota lain menyusul dan menjadikan SI Semarang sebagai pemimpin pergerakan. Karena itu, dalam kurun waktu 1920-1925 terjadi aksi-aksi mogok kerja. Isu pemogokan yang muncul pada masa itu serupa dengan isu saat ini, yakni seputar persoalan upah, tunjangan dan penyelesaian perselisihan buruh dan majikan. Sejak saat itu, gerakan buruh mendapat respon represif pemerintah atas aksi yang mereka lakukan. Menghadapi gelombang pemogokan buruh tersebut, mulanya pemerintah kolonial masih bersikap netral

selama motifnya ekonomi. Pemerintah beranggapan bahwa usaha rakyat untuk mengangkat taraf hidupnya akan berpengaruh baik pada kesadaran politik kaum pribumi. Segera setelah itu serikat-serikat buruh baru bermunculan, di samping VSTP, PGHB (serikat guru) dan PPPB (serikat pegawai pegadaian pribumi), antara lain Sarekat Postel, VIPBOW (serikat buruh pekerjaan umum), PFB (serikat buruh pabrik gula), *Typografenbond* (serikat buruh percetakan), dan PPDH (serikat pegawai kehutanan). Serikat buruh terbesar adalah VSTP, PPPB dan PFB, semuanya di bawah naungan Sarekat Islam. PPPB dikontrol oleh SI Surabaya, sedangkan PFB oleh SI Yogyakarta. Hal ini mengakibatkan terpecahnya SI menjadi dua yaitu; (SI-Merah) yang mengikuti Semaoen dan (SI-Putih) yang mengikuti Tjokroaminoto. Pasca terjadinya perpecahan di tubuh SI, Tjokroaminoto menata kembali Sarekat Islam menjadi Partai Sarekat Islam yang baru. Para pendukung komunis meninggalkan organisasi ini, dan membawa serta banyak anggota bersama mereka; Cabang-cabang SI Merah menjadi Sarekat Rakyat.

Akibat dari kegagalan aksi politik PKI tahun 1926 Gerakan buruh setelah itu memasuki masa sepi. Otoritas Hindia Belanda banyak memberangus tumbuhnya kelompok radikal gerakan buruh yang dipengaruhi oleh perkembangan Partai Komunis Indonesia (PKI). Takashi Shiraishi (1987) melukiskan, gerakan buruh periode 1910-1930 memberi warna “progresif” dalam wajah gerakan politik nasional.²⁰ Di masa ini pemerintah kemudian mensahkan artikel 161 bis. Pemerintah juga beraktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman yang secara terpusat mempunyai bagian untuk mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.

Tabel
Berbagai Aksi Pemogokan Buruh Pada Masa Kolonial²¹

Tahun	Aksi Pemogokan
1920	Pemogokan buruh terjadi pada 72 pabrik gula di seluruh Jawa. Dari jumlah itu 28 pemogokan terjadi pada masa sebelum dan sesudah giling yang meliputi 4.700 pekerja; sedangkan pemogokan yang lain terjadi dalam masa giling (dari bulan Mei sampai Oktober) dengan pemogokan terdiri dari 20.716 orang. Pemogokan yang terjadi di luar musim giling biasanya terpaksa dilakukan sebagai reaksi tindakan pengusaha yang dianggap tidak adil dan sewenang-wenang. Dari jumlah 4.700 pemogok sebagian besar terdiri dari tukang yang berperan penting dalam menjalankan proses produksi di pabrik gula. Pemogokan dalam musim giling biasanya dilakukan atas inisiatif buruh karena motif-motif ekonomis. Gerakan telah dipersiapkan sehingga meskipun pemogok yang terdiri dari buruh tetap hanya mencapai 1.997 orang tetapi mereka mampu memimpin sejumlah besar buruh musiman (7.584 orang) dan buruh tidak tetap sekitar pabrik (11.135 orang).
1920	Para pekerja anggota Personeel Fabrik Bond (PFB) mogok kerja, menuntut majikan supaya mau mengakui keberadaan Serikat Pekerja dan menaikkan upah yang dipimpin oleh Surjopranoto komisaris CSI.
1921	Harga gula, komoditas andalan Belanda di tanah jajahannya jatuh di pasaran dunia. Pemodal Belanda

²⁰ Launa, “May Day dan Dinamika Gerakan Buruh”, *Suara Karya*, 1 Mei 2007

²¹ *http://rumahkiri.net/PDF/POWERED/PDF_GEN/ERATED*, 22 April 2008, 14:51

¹⁸ Heather Sutherland, *Op. Cit.*, hal. 119

¹⁹ *Ibid.*, hal. 115

	yang mengalami kerugian cukup besar terpaksa harus menekan ongkos produksi secara besar-besaran, diantaranya adalah dengan memangkas upah buruh. Buruknya kondisi kerja waktu itu memicu pergolakan aksi buruh. Pemerintah mengaktifkan kantor Pengawasan Perburuhan yang berada dibawah Departemen Kehakiman. Ia punya bagian yang secara terpusat mengawasi pergerakan serikat buruh dan mengamati kebutuhan dikeluarkannya peraturan hukum baru menyangkut perburuhan.
1922	Para pekerja pelabuhan Surabaya melancarkan aksi mogok kerja, menuntut perbaikan nasib. PPKB dan Revolutionaire Vakcentrale berhasil membangun aliansi yang bernama PVH (Persatuan Vakbond Hindia).
1923	Pegawai Kereta Api mogok kerja. Tuntutan mereka kala itu kurang berhasil. Pemerintah kolonial melarang adanya aksi mogok kerja, yang dilakukan kaum pekerja dan segera dikeluarkan Undang-Undang tentang larangan mogok kerja (artikel 161 bis Buku Hukum Pidana) tanggal 10 Mei 1923.
1924	Pada bulan Juni Serikat Pekerja Indonesia bersama-sama Serikat Pekerja Filipina, India, Jepang dan Tiongkok di undang untuk menghadiri Konferensi Serikat Pekerja Angkutan Laut di Kanton. Dengan demikian keberadaan dan kehidupan Serikat Pekerja di samping lebih erat menjalin hubungan kerja sama dengan Serikat-Serikat Pekerja Internasional, juga lebih memperkuat posisi.

Pasca 1926 panggung perjuangan politik dikuasai oleh para pemimpin-pemimpin yang berasal dari kaum intelektual, hanya sedikit yang melakukan pembangunan di basis massa, aksi-aksi massa yang sebelum tahun 1926 sangat marak menjadi nyaris hilang. Perdebatan-perdebatan politik hanya terjadi di panggung-panggung politik ciptaan Belanda, seperti Volksraad. Ini tidak lain sebagai usaha Belanda memutus hubungan antara kaum terpelajar dengan massa rakyat. Karena akan lebih mudah bagi Belanda menumpas kaum terpelajar yang cukup "vokal", dengan cara membuangnya ke Belanda atau Digul.

Kekalahan Belanda dari Jepang pada tahun 1942 pada awalnya membawa harapan baru bagi organisasi-organisasi pergerakan tersebut untuk melanjutkan perjuangannya. Namun ternyata justru pada masa pendudukan Jepang yang singkat ini (1942-1945), semua gerakan kebangsaan, SP, dan gerakan ormas apapun bentuk dan ideologinya dibubarkan. Banyak di antara mereka yang kemudian dijadikan romusha atau pekerja paksa. Hal ini sudah barang tentu sangat berpengaruh terhadap kondisi mereka baik secara fisik maupun phsikis yang selalu dalam posisi terintimidasi tentara Nippon. Meski demikian, kondisi ini tidak sepenuhnya dapat memadamkan semangat dan jiwa perjuangan gerakan-gerakan tersebut.

3. Serikat Pekerja Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan lahir berbagai organisasi di masyarakat. Dari mulai organisasi persatuan yang sederhana sampai organisasi bersenjata. Menurut Sandra babak ini disebut sebagai masa merintis pergerakan buruh yang tersusun.²² Pada tanggal 15 September 1945, lahir

sebuah organisasi massa buruh yang bernama BBI (Barisan Buruh Indonesia). Organisasi ini mengutamakan barisan buruh untuk memudahkan mobilisasi oleh serikat sekerja dan Partai Buruh. Dalam kongresnya pada bulan September 1945 yang dihadiri oleh kaum buruh dan tani, tercetuslah Partai Buruh Indonesia. BBI juga sepakat untuk menuntaskan revolusi nasional. Untuk mempertahankan tanah air dari serangan musuh, BBI kemudian membentuk Laskar Buruh bersenjata di pabrik-pabrik, sedangkan untuk mengayomi kaum perempuan dibentuk Barisan Buruh Wanita (BBW).

Pada tahun 1946, BBI dilebur menjadi GASBI (Gabungan Serikat Buruh Indonesia). Serikat buruh yang tidak sepakat dengan struktur GASBI keluar dan membantuk GASBV (Gabungan Serikat Buruh Vertikal). Tetapi pada bulan November, tahun yang sama, atas usaha Alimin dan Harjono, GASBI dan GASBV berhasil dilebur menjadi SOBSI (Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia), bentuk organisasi ini adalah demokratis sentralisme di mana para pengurus sentralnya bertanggung jawab kepada kongres. SOBSI adalah kemajuan besar dalam gerakan buruh, sebab organisasi ini berhasil mengkonsolidasikan 34 pusat serikat buruh. Meskipun SOBSI menyatakan diri bukan sebagai partai politik tetapi dalam menjalankan aksinya, gerakan ini tidak lepas dari gelombang politik. Karena itu, dalam perjuangannya SOBSI bekerja sama dengan golongan dan partai politik yang sehaluan. Pada tahun 1948, SOBSI sempat mengalami perpecahan akibat perbedaan sikap dalam menanggapi perjanjian Renville. Tetapi tidak lama kemudian SOBSI berhasil kembali mengkonsolidasikan pecahan-pecahannya. Bahkan dalam pernyataan politiknya tahun 1948, SOBSI kemudian menegaskan menolak perjanjian Renville. SOBSI juga sangat berpengaruh, misalnya, dalam nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di akhir tahun 1950-an.

Pada dekade 1950-an, dinamika politik buruh di Tanah Air kian terasa. Ratusan organisasi serikat buruh (SB) berafiliasi dengan kekuatan politik sebagai underbouwnya dengan tujuan untuk mengumpulkan anggota sebanyak mungkin seperti; Serikat Buruh Muslimin Indonesia (SARBUMUSI) berafiliasi dengan NU. Lalu Serikat Buruh Muslimin Indonesia dengan Parmusi, Sentral Organisasi Buruh Republik Indonesia (SOBRI) dengan Murba, Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) pun berafiliasi dengan militer, mereka berperan aktif dalam mendorong "pematangan" demokrasi dalam kehidupan politik nasional. Buruh yang terlibat dalam organisasi tertentu di tahun 1950-an jumlahnya mencapai antara 3-4 juta orang. Kaum buruh ini bergabung di bawah sekitar 150 serikat buruh nasional, dan ratusan serikat buruh lainnya di tingkat lokal, yang tak memiliki afiliasi di tingkat nasional. Serikat-serikat buruh nasional memiliki jumlah anggota yang beragam.²³ Di antara sekian banyak serikat

²² *http://rumahkiri.net/PDF/POWERED/PDF_GENERATED*, 22 April 2008, 14:51

²³ Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia (Sarbupri) misalnya mengklaim anggotanya sebanyak 600.000 orang. Sementara serikat buruh nasional seperti Perhimpunan Ahli Gula Indonesia (PAGI) hanya memiliki 600 anggota.

buruh tersebut, terdapat empat federasi serikat buruh yang cukup besar yaitu:

1. SOBSI yang dibentuk di tahun 1946 ketika Indonesia sedang berada dalam perang kemerdekaan, federasi ini memiliki organisasi yang baik, dan paling efisien dari segi administrasi dengan anggota sekitar 60% dari seluruh jumlah buruh yang terorganisir. Kementerian Perburuhan di tahun 1956 menyatakan federasi ini memiliki 2.661.970 anggota. Organisasi ini memiliki hubungan erat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang kembali ke panggung politik pada tahun 1951 di bawah pimpinan D.N. Aidit. SOBSI terdiri atas 39 serikat buruh nasional dan sekitar 800 serikat buruh lokal. Di antaranya yang cukup penting adalah SBG, Sarbupri, Sarbuksi (Kehutanan), SBPP (Pelabuhan), SBKA, SBKB (Kendaraan Bermotor), SERBAUD (Angkatan Udara), SB Postel, Perbum (Minyak), SBTI (Tambang), SBIM (Industri Metal), SBRI (Rokok), Sarbufis (Film), SBKP (Kementerian Pertahanan), Kemperbu, SBPU (Pekerjaan Umum), SEBDA, dan SBPI (Percetakan). SOBSI juga memiliki afiliasi dengan *World Federation of Trade Unions* (WFTU).
2. Kongres Buruh Seluruh Indonesia (KBSI) yang berhaluan non-komunis, didirikan pada tanggal 12 Mei 1953. Pada saat pembentukan anggotanya mencapai 800.000 orang, tapi seiring dengan terjadinya perpecahan di tingkat kepemimpinannya kemudian berkurang. Serikat buruh yang menjadi pendukung federasi ini adalah PERBUPRI (perkebunan), PBKA (kereta api), SKBM (minyak), SBP (pertambangan), SBKPM (penerbangan), OBPSI (perniagaan). Organisasi ini tak memiliki afiliasi dengan organisasi buruh di tingkat internasional, serta amat terbatas kegiatannya hanya pada hal-hal yang berhubungan dengan keadilan sosial.
3. SBII (Serikat Buruh Islam Indonesia) yang berdiri pada bulan November 1948 oleh tokoh-tokoh Masyumi yang menyadari pentingnya gerakan organisasi buruh sebagai basis pendukung partai. Pada tahun 1956 anggotanya diklaim sebanyak 275.000 orang dari berbagai bidang pekerjaan. Pimpinan SBII ini dipegang oleh Mr. Jusuf Wibisono, anggota Presidium Masyumi dan pernah menjadi Menteri Keuangan. Sesuai dengan namanya, organisasi ini melandaskan gagasannya pada ajaran-ajaran Quran. SBII juga memiliki afiliasi dengan *International Conference of Free Trade Unions* (ICFTU) dan mengadakan kontak dengan gerakan buruh di negara-negara Islam.
4. Kesatuan Buruh Kerakjatan Indonesia (KBKI) yang semula bernama Konsentrasi Buruh Kerakjatan Indonesia, didirikan pada tanggal 10 Desember 1952. Organisasi ini memiliki hubungan dengan Partai Nasional Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan dalam pernyataan tertulisnya bahwa mereka bekerja bersama PNI dalam mencapai tujuan-tujuannya. Adapun azas yang melandasi organisasi ini adalah Marhaenisme (ajaran Soekarno). Pada tahun 1955 organisasi ini mengatakan memiliki anggota sebanyak 95.000 orang. Anggota KBKI sekaligus merangkap

juga sebagai anggota PNI, keberhasilan KBKI dalam menggalang kekuatan (di tahun 1958 ditaksir jumlah anggotanya lebih dari setengah juta orang) tidak dapat dilepaskan dari keberhasilan PNI. Walaupun memiliki jaringan dan turut berpartisipasi dalam aktivitas internasional, KBKI memilih untuk tidak bergabung dengan organisasi internasional.

Pada tahun 1957, Soekarno mengeluarkan dua konsepsi mengenai kabinet karya dan dewan nasional. Kabinet karya ini adalah kabinet eksekutif yang menampung orang-orang di parlemen dan partai politik. Dewan Nasional berisi badan penasehat dari kekuatan di luar parlemen. Sementara Dewan nasional adalah golongan fungsional, alat demokrasi, penggolongan warga negara Indonesia menurut tugas pekerjaan, lapangan produksi dan jasa dalam melaksanakan cita-cita proklamasi. Tiga aliran yang dominan pada masa itu adalah kiri, nasionalis dan Islam. Gerakan buruh kiri direpresentasikan oleh SOBSI sebagai bagian dari PKI, KBKI (Konsentrasi Buruh Kerakyatan Indonesia) yang merupakan bagian dari PNI, serta Serikat Buruh Muslim Indonesia (SBMI) yang berafiliasi dengan Masyumi. Buruh sebagai golongan fungsional mendapatkan tempat di Dewan Perancang Nasional. Dewan yang menyiapkan rencana pembangunan semesta jangka panjang. Anggota Dewan ini 77 orang, dan dari 77 itu ada lima wakil angkatan buruh atau pegawai yaitu; dari SOBSI, SOBRI, RKS dan dua orang dari KBKI. Sementara di Dewan Pertimbangan Agung, duduk dua orang wakil dari buruh yaitu dari SOBSI dan KBKI.

Tidak stabilnya kondisi politik dan pemerintahan pada masa demokrasi parlementer²⁴ yang ditandai dengan cepatnya pergantian pemerintahan, membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit pada tahun 1959 yang menyatakan kembali ke UUD 1945. Keluarnya dekrit presiden tersebut sekaligus menandai dimulainya era demokrasi terpimpin.²⁵ Dalam kutipan pidatonya, Soekarno menegaskan bahwa kita kembali ke jiwa revolusi dan tahun penemuan kembali revolusi. Manifestasi politik (Manipol) 17 Agustus 1959 ini diputuskan oleh DPA sebagai GBHN.²⁶ Dalam salah satu isinya, Manipol menegaskan kekuatan kelas buruh dan kaum tani sebagai kekuatan pokok revolusi Indonesia. Peristiwa ini kemudian menjadi pemicu baru bagi gerakan buruh dalam tugasnya memenuhi panggilan revolusi. Sebagai bagian dari Tri Komando Rakyat (Trikorra) dalam rangka perjuangan untuk mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan "Ibu Pertiwi", Presiden Soekarno

²⁴ Dengan payung konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950.

²⁵ Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang seluruh keputusan serta pemikirannya hanya berpusat pada pemimpinnya saja.

²⁶ Dalam pidato tersebut, secara garis besar, Soekarno mencanangkan dilaksanakannya sistem Demokrasi Terpimpin. Pada intinya manipol terdiri atas lima hal pokok, yaitu: UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia yang disingkat USDEK. Sejak saat itu, setiap gerak dan langkah seluruh komponen bangsa Indonesia diarahkan berdasar pada Manipol-USDEK. Oleh karena itu, sistem ekonomi terpimpin menuntut seluruh unsur perekonomian Indonesia menjadi alat revolusi. Dalam Rudi Hartanto, "Gerakan Banting Stir Ekonomi Soekarno; Haluan Ekonomi Anti-Imperialisme!", <http://www.berdikarionline.com>, Minggu, 17 Februari 2008

berusaha untuk menyatukan buruh dalam satu wadah bersama (unitaris) dengan membentuk Serikat Bersama Buruh (Sekber Buruh) yang merupakan gabungan dari berbagaimacam organisasi buruh di Indonesia.

Pada masa ini hubungan antara negara dengan buruh sangat erat, terutama serikat-serikat buruh beraliran kiri yang berafiliasi dengan PKI dan PNI yang berada dibawah kendalinya. Sebagai pengejawantahan dari gagasan NASAKOM presiden, PKI menduduki tempat terhormat dalam panggung kekuasaan, terlebih setelah keluarnya Masyumi dari lingkaran utama kekuasaan politik nasional. Dengan tiadanya Masyumi, maka hanya tinggal PKI yang dapat diandalkan Presiden Soekarno saat itu untuk menopang kekuasaannya. Karena itu, Soekarno kemudian memberi tempat yang banyak bagi kelompok ini untuk menduduki pos-pos penting dalam pemerintahannya seperti pengangkatan D.N. Aidit ketua PKI sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) pada Kabinet Kerja III (1962-1963), Kabinet Kerja IV (1963-1964) dan Kabinet Dwikora I (1964-1966). Loyalitas Aidit terhadap presiden dibuktikannya dengan mengembangkan sejumlah program PKI untuk berbagai kelompok masyarakat, seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Lekra dengan tujuan untuk memperkuat dukungannya terhadap rezim.

C. PENUTUP: Kesimpulan dan Implikasi

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa dinamika perkembangan gerakan serikat pekerja di Indonesia pada masa kolonial sampai masa pergerakan sangat dipengaruhi oleh kelas menengah terpelajar yang mulai tumbuh pada saat itu. Kelas menengah tersebut telah membawa ide-ide dan gagasan-gagasan baru baik dalam pola organisasi maupun pola perjuangan. Misalnya pembaruan dalam hal berorganisasi yang diperkenalkan BO merupakan suatu langkah maju dalam menata sistem keorganisasian di Indonesia pada masa itu. Begitu pula dengan pengaruh-pengaruh ideologi Marxist-Sosialis yang sebagian besar di bawa oleh kaum intelektual yang pernah mengenyam pendidikan di luar negeri (Belanda), turut juga membawa perubahan dalam corak perlawanan buruh terhadap majikan atau pemerintah misalnya dengan melakukan aksi pemogokan. Meskipun mengalami banyak kegagalan dalam perjuangannya, aksi-aksi tersebut tidak sepenuhnya dapat dikatakan gagal. Sebab akibat dari adanya gerakan-gerakan perlawanan tersebut, pemerintah Hindia Belanda dengan terpaksa berusaha mengkooptasi kelompok-kelompok pribumi tersebut untuk bergabung dalam *Volksraad* (Dewan Perwakilan) yang pada masa itu salah-satunya diwakili oleh Tjokroaminoto dari SI sebagai wakil kelompok pribumi.

Pada masa kabinet parlementer gerakan-gerakan serikat pekerja mengalami politisasi dengan melibatkan diri pada persaingan politik dan terkooptasi ke dalam parpol-parpol yang tumbuh subur berdasarkan aliran ideologi yang diusungnya. Sementara di masa demokrasi terpimpin Soekarno, gerakan buruh pernah menjadi bagian yang amat penting dari kehidupan bangsa. Orde Lama memberikan tempat yang terhormat kepada gerakan buruh dengan menyebutkannya sebagai soko

guru revolusi. Perwakilan kaum buruh diangkat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung, MPRS, DPR GR, Front Nasional, dan berbagai lembaga negara penting lainnya. Sehingga dapat dikatakan gerakan buruh saat itu merupakan salah satu kekuatan utama penopang rezim yang berkuasa. Masa itu juga merupakan awal dari adanya upaya pemerintah untuk menjadikan SP-SP tersebut menjadi unitaris dengan mencoba menggabungkannya dalam satu wadah, namun usaha tersebut gagal dan baru dapat terwujud pada masa Orde Baru. Setelah terjadinya peristiwa G-30-S/PKI, SP-SP yang selama itu berafiliasi dengan PKI dibubarkan pemerintahan rezim Orde-Baru. Untuk mendukung kekuasaannya pemerintah Orde-Baru membentuk wadah perjuangan Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI) yang bersama dengan kesatuan lainnya (KAMI, KAPPI, KASI, dan sebagainya) berperan-serta aktif menegakkan Orde-Baru.

Sebagai perbandingan, perbedaan antara gerakan buruh pada masa kolonial dengan masa orde lama adalah terletak pada tujuannya. Pada masa kolonial gerakan buruh menjadi salah satu kekuatan oposisi yang menentang kekuasaan pemerintah, sementara pada masa orde lama gerakan buruh merupakan salah satu kekuatan utama penopang kekuasaan rezim yang berkuasa.

D. DAFTAR PUSTAKA

- Aris Wibawa (ed.), *Menuju Hubungan Perburuhan Demokratik*, Yogyakarta: LAPERA dan FISIP Univ. Atmajaya Yogya, 1998.
- Arnold J. Toynbee, *A Study Of History*, New York: Abridgement of Volume I-VI, 1947.
- Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Launa, "May Day dan Dinamika Gerakan Buruh", *Suara Karya*, 1 Mei 2007.
- J. D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, Jakarta: Grafiti, 2003.
- Richard Robinson dalam Richard Tanter dan Kenneth Young, *Politik Kelas Menengah Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Rudi Hartanto, "Gerakan Banting Stir Ekonomi Soekarno; Haluan Ekonomi Anti-Imperialisme!", <http://www.berdikarionline.com>, Minggu, 17 Februari 2008.
- Sartono Kartodirdjo (ed.), *Elite dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES, 1981.
- Sentanoe Kertonegoro, *Gerakan Serikat Pekerja*, Jakarta: Yayasan Tenaga Kerja Indonesia, 2001.
- Vedi R. Hadiz, "Politik Gerakan Buruh di Asia Tenggara", *Jurnal SEDANE Vol.3 No.2*, 2005.
- Yunus Shamad, *Hubungan Industrial di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Sumberdaya Manusia, 2000.
- http://rumahkiri.net_PDF_POWERED_PDF_GENERAT ED, 22 April 2008, diakses pukul 14:51